

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Paket Pekerjaan	1.1	Kode Non Tender : 10313243000
	1.2	Nama paket pekerjaan : Pengadaan Pembuatan Jembatan dan Pengaspalan UPTD BLK Kota Pekalongan
	1.3	Uraian singkat paket pekerjaan : Pengadaan Pembuatan Jembatan dan Pengaspalan UPTD BLK Kota Pekalongan
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan : Harga Satuan
B. Identitas Pejabat Pengadaan	1.6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan : Bagian PBJ dan Minbang Setda Kota Pekalongan
	1.9	<i>Website</i> Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah :..... [diisi alamat website K/L/PD]
	1.10	<i>Website</i> SPSE : lpse.pekalongankota.go.id
C. Sumber Pendanaan	2	- Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : DPA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025. - Pagu Anggaran : Rp. 165.000.000,00 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. 165.000.000,00
D. Persyaratan Kualifikasi Pelak Usaha	5	Persyaratan Kualifikasi: - Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi/NIB; - Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan: - Kualifikasi : Usaha Kecil; dan - Klasifikasi : Bangunan Sipil - Subklasifikasi : SI 003 Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara atau BS001 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, yang masih berlaku - Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak <i>[Valid/Tidak Valid]</i>. - Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); - Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

		6. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP); 7. Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua.												
E. Masa Berlaku Penawaran	7.3.a.2) 10.2.a.3)	Masa berlaku surat penawaran: 15 (lima belas) hari kalender												
F. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	7.2.a.3) 10.2.a.4)	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 90 (sembilan puluh) hari kalender												
G. Persyaratan Teknis	10.3.e.1)	Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: <table><tr><th>No</th><th>Jenis</th><th>Kapasitas</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Mesin gilas</td><td>-</td><td>1 unit</td></tr><tr><td>2</td><td>Vibratory Roller</td><td></td><td>1 unit</td></tr></table> [diisi oleh Pejabat Pengadaan, untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) atau dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, persyaratan ini dikecualikan] Status Kepemilikan : (1) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice); (2) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran); (3) Sewa dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa.	No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	1	Mesin gilas	-	1 unit	2	Vibratory Roller		1 unit
No	Jenis	Kapasitas	Jumlah											
1	Mesin gilas	-	1 unit											
2	Vibratory Roller		1 unit											
	10.3.e.2)	Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: <table><tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Pengalaman</th><th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th></tr><tr><td>1</td><td>Pelaksana</td><td>2 thn</td><td>SKK Pelaksana Pekerjaan Jalan</td></tr></table> [diisi oleh Pejabat Pengadaan, untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) atau dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, persyaratan ini dikecualikan] Keterangan: Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat klarifikasi/negosiasi	No	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja	1	Pelaksana	2 thn	SKK Pelaksana Pekerjaan Jalan				
No	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja											
1	Pelaksana	2 thn	SKK Pelaksana Pekerjaan Jalan											